

Peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Atin Rohmatin¹, Farid Firmansyah², Fadllan³

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

Email: atinrohmatin99@gmail.com, faridfirmansyah@iainmadura.ac.id,
fadllan@iainmadura.ac.id

Abstrak

Surat Berharga Negara (SBSN) atau Sukuk Negara merupakan Instrumen Investasi yang diterbitkan oleh pemerintah dalam bentuk surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah dan valuta asing. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan Sukuk Negara dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka. Hasil penelitian menyatakan sukuk Negara pertama kali diterbitkan pada tahun 2008 hingga saat ini telah membiayai banyak pembangunan di Indonesia. Kesimpulannya sukuk Negara berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui lima aspek yaitu, memperluas Layanan dan Fasilitas Kesehatan, meningkatkan Kualitas Pendidikan, memperkuat Ketahanan Pangan, mendorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat, dan mendukung Keberlangsungan Lingkungan. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan empiris berhubungan dengan peran SBSN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah dalam optimalisasi pengelolaan dana SBSN sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, serta dapat meningkatkan minat masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan negara melalui investasi di Sukuk Negara yang pengelolaannya berlandaskan syariah. Selama 17 tahun SBSN telah berperan dalam pembangunan infrastruktur di sektor kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan kelestarian lingkungan, sehingga SBSN telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Peran SBSN, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Indonesia

Abstract

State Sharia Securities (SBSN), also known as Sovereign Sukuk, were financial instruments issued by the Indonesian government as debt acknowledgment letters in both rupiah and foreign currencies. This study aimed to analyze the development of Sovereign Sukuk and its role in enhancing public welfare in Indonesia. This study uses a qualitative approach with the type of literature review research. The results of the study stated that the State sukuk was first issued in 2008 and has now financed many developments in Indonesia. In conclusion, State sukuk plays an

important role in improving the welfare of the Indonesian people through five aspects, namely, expanding Health Services and Facilities, improving the Quality of Education, strengthening Food Security, encouraging Physical Economic Improvement, and supporting Environmental Sustainability. This research is expected to provide empirical knowledge related to the role of SBSN in improving community welfare, besides that it is expected to be a reference for the government in optimizing the management of SBSN funds so that it can improve the welfare of the community equally, and can increase public interest in participating in state development through investment in State Sukuk whose management is based on sharia. For 17 years, SBSN has played a role in the development of infrastructure in the health, education, social, economic and environmental sustainability sectors, so that SBSN has been able to improve the welfare of the Indonesian people.

Keywords: The Role of SBSN, Improving Public Welfare, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam menjadi peluang besar bagi negara untuk mengembangkan industri keuangan syariah (Herianti et al., 2023; Saestu, 2023). Hingga tahun 2023 berdasarkan publikasi OJK, Indonesia di tingkat global menempati peringkat ke-7 terbesar dalam industri keuangan syariah. Sedangkan menurut *Islamic Finance Development Report 2023* Indonesia berhasil menduduki peringkat ketiga dalam industri keuangan syariah. Hasil yang telah dicapai menggambarkan bahwa sektor keuangan syariah di Indonesia semakin tumbuh besar untuk menyokong pembangunan ekonomi nasional (Anggoro et al., 2023).

Semakin besarnya sektor keuangan syariah di Indonesia hingga tahun 2023 pangsa pasar keuangan syariah telah tumbuh 0,26% lebih tinggi dari tahun 2022 yaitu 10,69% menjadi 10,95% (Sabilah, 2024). Momentum seperti ini menjadi kesempatan bagi negara untuk mengembangkan instrumen untuk membiayai APBN dengan sistem pengelolaan sesuai dengan prinsip syariah. Mekanisme pembiayaan sesuai syariah tentunya harus terbebas dari unsur maysir (judi), gharar (ketidakjelasan) dan riba (usury) (Sundari & Ridwan, 2022). Salah satu instrumen yang digunakan negara untuk menyokong APBN yaitu menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dalam dunia internasional dengan istilah Sukuk Negara.

Sukuk diterbitkan pertama kali pada tahun 2008 hal ini sesuai dengan peraturan UU No. 19 Tahun 2008 yang berisi tentang Surat Berharga Negara (SBN) sebagai surat pengakuan pembiayaan negara dalam mata uang rupiah maupun valas yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya (JEFRI, 2022; Rambe, 2023). Penerbitan sukuk oleh negara memiliki tujuan untuk memenuhi target defisit Negara. Defisit negara yang terjadi karena ketidakseimbangan antara pendapatan negara dengan belanja negara, dimana nilai belanja lebih tinggi dibandingkan nilai pendapatan yang diperoleh. Defisit APBN ditutupi dengan beberapa sumber pembiayaan yang salah satunya melalui penerbitan

sukuk. Selain itu sukuk menjadi dorongan perkembangan sektor keuangan syariah di dalam negeri maupun di tingkat internasional serta sebagai sumber pembiayaan proyek infrastruktur (Fahlevi, 2024).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sejahtera dapat diartikan sebagai aman, sentosa dan Makmur (Nasution & Budiman, 2024). Aman dapat dipahami sebagai kebebasan dari berbagai ancaman. Kehidupan yang sentosa adalah hidup dalam keadaan aman, seta damai yang didalamnya tidak ada kekacauan. Kesejahteraan dapat dipahami sebagai suatu keadaan sejahtera (well-being) suatu individu maupun kelompok. Dalam hal ini sejahtera mengacu kepada keadaan terpenuhinya tingkat kesehatan, keamanan, terpenuhinya kebutuhan pangan, tingkat partisipasi, dan kondisi lainnya yang dialami oleh individu dalam masyarakat maupun kelompok dalam Masyarakat (Khatimah, 2023).

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 32/IDSN-MUI/III/2002 mengizinkan sukuk sebagai obligasi yang dikelola sesuai prinsip syariah. Sukuk, atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pertama kali diterbitkan pada 2008 berdasarkan UU No. 19 Tahun 2008. SBSN merupakan instrumen investasi yang dikeluarkan negara dan diperjualbelikan kepada masyarakat, dengan pembagian imbal hasil sesuai prinsip syariah, berbeda dengan Surat Utang Negara (SUN) yang menggunakan mekanisme konvensional berbasis bunga.

Berdasarkan data di lapangan jejak selama 10 tahun terakhir, penerbitan sukuk dari tahun 2014 hingga 2023 mengalami peningkatan yang cukup stabil, hal ini membuktikan bahwa sukuk menjadi instrument efektif yang digunakan negara dalam memenuhi defisit APBN. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penerbitan sukuk yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penerbitan yang tinggi di tahun 2020 disebabkan defisit APBN yang besar diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Selepas tahun 2020 penerbitan sukuk mulai mengalami penurunan, penurunan volume penerbitan terjadi bukan karena kurang minatnya investor terhadap Sukuk Negara, hal ini terjadi dikarenakan target penerbitan Sukuk Negara dalam memenuhi pembiayaan terhadap APBN mulai berkurang.

Berdasarkan publikasi OJK hingga tahun dari tahun 2008 hingga 2023 jumlah kumulatif sukuk yang telah berperan sebagai pembiayaan APBN telah mencapai lebih dari 2 kuardlirion, dengan lebih rinci sebesar Rp. 2.524.200.000.000. Pembiayaan sebesar itu dialokasikan untuk target pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan efektifitas ekonomi sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik.

Penelitian terdahulu yang berjudul Optimalisasi Peran Sukuk Sebagai Instrumen Investasi Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Romadhoni et al., (2023) Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerbitan SBSN sebagai sarana bagi individu yang kelebihan dana, selain itu SBSN memiliki faktor keamanan dan tingkat profit yang dijamin oleh negara. Sehingga kesimpulan yang diperoleh bahwa SBSN menjadi salah satu instrument investasi yang aman dan minim risiko, selain itu juga dapat membantu pemerintah dalam menurunkan inflasi dan juga

mengembangkan perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat. Sehingga harus dikelola dengan optimal agar bisa membantu pembangunan ekonomi nasional (Romadhoni et al., 2023). Penelitian tentang peran sukuk juga dilakukan oleh Raharjo yang judul penelitiannya tentang Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia, yang hasil penelitiannya menyatakan dengan adanya Sukuk Negara, ruang fiskal negara semakin lebar sehingga pemerintah dapat menyalurkan dana yang dihimpun dari sumber-sumber yang lain untuk pembiayaan infrastruktur (Amaliyah et al., 2023).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Nurlatifa yang berjudul Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan sukuk menjadi salah penyumbang pembiayaan dalam APBN, dimana APBN disalurkan untuk membiayai proyek pembangunan negara di bidang maritim, perhubungan, industri manufaktur, pembangunan infrastruktur, dan perumahan (Trimulato, n.d.).

Penelitian ini tidak sama dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang ada. Penelitian sebelumnya yang terfokuskan kepada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional serta pembangunan infrastruktur. Sedangkan dalam penelitian ini terfokuskan kepada bagaimana dampak langsung SBSN dalam mensejahterkan masyarakat Indonesia. Sehingga akan dikaji bagaimana peran SBSN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada dampak makroekonomi dan pembiayaan infrastruktur besar, penelitian ini menggali dampak sosial dan ekonomi langsung dari SBSN, dengan penekanan pada program-program sosial yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti layanan kesehatan gratis dan pemberdayaan UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perkembangan SBSN di Indonesia dan bagaimana SBSN berperan Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan SBSN di Indonesia dan menggali bagaimana peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui berbagai sektor pembangunan. Manfaat penelitian ini adalah memberikan wawasan empiris terkait optimalisasi penggunaan SBSN dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, serta menjadi referensi bagi pemerintah dalam memaksimalkan pengelolaan dana SBSN.

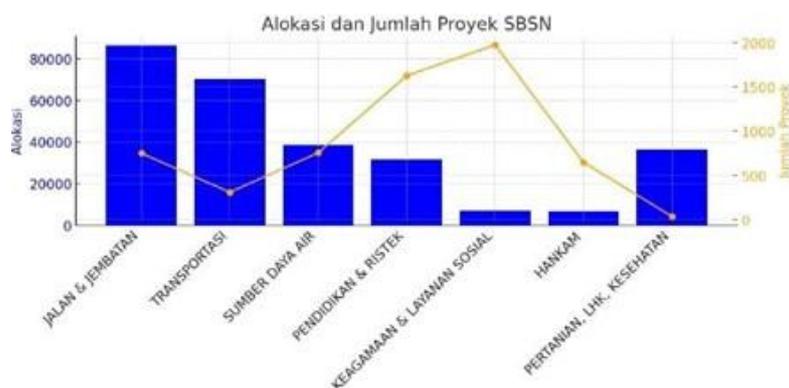
METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*). Studi kepustakaan merupakan metode dengan mencari literatur yang selaras dengan isu yang diangkat dalam penelitian. Studi kepustakaan mempresentasikan analisis teoritis, kajian ilmiah, rujukan referensi yang berkaitan dengan kebiasaan (Sugiyono, 2020). Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari referensi yang telah ada, baik dari buku, jurnal maupun publikasi pemerintah. Teknik

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber referensi atau literature yang telah ada.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Alokasi SBSN di ke Beberapa Sektor



Project Financing Sukuk

Project Financing Sukuk merupakan pembiayaan proyek infrastruktur yang sumber dananya berasal dari SBSN.

1. Sektor Pendidikan

a. Sektor Infrastruktur Pendidikan

Tabel 1. Daftar Pembiayaan SBSN Pada Sektor Pendidikan

PROYEK PEMBANGUNAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jml
PTN	-	-	2	7	24	19	25	22	99
PTKIN	25	32	34	41	8	11	20	21	192
Madrasah	-	-	32	125	136	269	215	138	915
SMK Kehutanan	-	-	-	-	1	1	1	1	4
Lab Ristek	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Lab LIPI	-	-	1	3	4	7	-	-	15
Gedung LDDIKTI	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SMAK Perindustrian	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Poltek Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	8	8
Literasi Beragama	-	-	-	-	-	-	-	1	1

Diolah dari Data Laporan Tahunan DJPPR

Berdasarkan tabel di pengalokasian pembiayaan sukuk semakin bertambah setiap tahunnya, dari pembiayaan awal yang berfokus pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), terus berkembang membiayai Perguruan Tinggi Negeri di bawah kementerian Pendidikan dan Budaya, meningkatkan infrastruktur madrasah, hingga membiayai lembaga, lembaga penunjang pendidikan. Pembangunan

dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pendidikan di seluruh pelosok negeri.

b. Sektor Program Penunjang Pendidikan

Tabel 2. Daftar Pembiayaan SBSN pada Sektor Penunjang Pendidikan

No	Jenis Sukuk	Nazhir	Program Sosial Penunjang Pendidikan	Tahun
1	SWR002	LAZIZNU	Beasiswa Santri	2021
2	SWR002	LAZIZMUI	Program Pendidikan Bakti Guru, Beasiswa Mentari, dan Beasiswa sang Surya	2021
3	SWR002	BMM	Beasiswa Sarjana (100 Mahasiswa PTN dan PTS)	2021
4	SWR002	DDR	Bantuan biaya pendidikan Siswa Dhuafa (25 Siswa)	2021
5	SWR002	DDII	Beasiswa Yatim Dhuafa (Target 150)	2021
6	SWR002		Pengadaan sarana kegiatan belajar yatim dhuafa di Bekasi dan Sukabumi	2021
7	SWR003	BWI	Program beasiswa untuk 500 mahasiswa	2022
8	SWR004	LAZIZMU	Beasiswa pendidikan dan kesejahteraan guru	2023
9	SWR004	Dompot Dhuafa	Program Digitalisasi 1 juta sekolah diseluruh Indonesia	2023
10	SWR004		Program Beasiswa Dhuafa	2023
11	SWR004	BWI	Beasiswa Pendidikan	2023
12	SWR004	BMM	Beasiswa Tahfiz di Aset Wakaf Quran Learning Center Yogyakarta	2023
13	SWR005	BSI Maslahat	Program BSI Scholarship Pelajar	2024
14	SWR005	Dompot Dhuafa	Program Pembangunan Asrama Pesantren Tahfidz Green Lido, Sukabumi	2024
15	SWR005	BMM	Beasiswa Tahfiz di Aset Wakaf Quran Learning Center Yogyakarta	2024
16	SWR005	LAZIZMU	Beasiswa, Sarana Pendidikan dan Bantuan Kesejahteraan Guru	2024

Diolah dari Data Laporan Tahunan DJPPR

Pada program penunjang pendidikan sumber utama pembiayaan berasal dari SBSN seri Sukuk Wakaf Ritel (SWR) yang diterbitkan sejak tahun 2020 untuk berfokus pada pembiayaan program untuk kesejahteraan pelajar dan tenaga pengajar. Pembiayaan pendidikan berupa beasiswa dengan tujuan untuk meningkatkan minat masyarakat kepada pendidikan, karena pendidikan menjadi pondasi untuk membangun sebuah negara.

2. Sektor Kesehatan

Tabel 3. Daftar Pembiayaan SBSN pada Sektor Kesehatan

No	Jenis Sukuk	Nazhir	Program Penunjang Kesehatan	Tahun
1	SWR001	BWI	Operasi katarak gratis bagi kaum dhuafa di RS Achmad Wardi dan Pengadaan Ambulance	2020
2	SWR002	LAZIZNU	Klinik Pesantren di 2 Ponpes di Jakarta dan Jawa Timur	2021
3	SWR002	LAZIZMU	Indonesia <i>Mobile Clinic</i>	2021
4	SWR002	DDR	Pembiayaan pengobatan pasien dhuafa	2021
5	SWR002	BWI	Pengadaan <i>mobile screening</i> retina dan katarak	2021
6	SWR002		Pemeriksaan gratis pasien dhuafa selama 2 tahun	2021
7	SWR003	Dompet Dhuafa	Pengadaan alat kesehatan	2022
8	SWR003	BWI	Revitalisasi Ruang Rawat Inap	2022
9	SWR003	LAZIZMU	Sanitasi untuk Masyarakat (SAUM)	2022
10	SWR005	Dompet Dhuafa	Pengadaan Alat Kesehatan untuk RS AKA Sri Bhawono Lampung Timur	2024

Diolah dari Data Laporan Tahunan DJPPR

Berdasarkan tabel di atas SBSN telah banyak membiayai program penunjang kesehatan. Melalui penyediaan fasilitas dan layanan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Program-program yang telah diluncurkan menjadi katalis untuk mensejahterakan masyarakat secara merata, karena layanan dan fasilitas kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi agar setiap individu tidak perlu khawatir dengan masalah kesehatan yang dihadapi. Sektor kesehatan juga menjadi penyokong agar setiap individu lebih produktif. Dalam bidang infrastruktur kesehatan, SBSN belum membiayai pembangunan infrastruktur dikarenakan hingga tahun 2025 fokus SBSN masih pada pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, transportasi dan pendidikan.

3. Sektor Ketahanan Pangan

Tabel 4. Daftar Pembiayaan SBSN Pada Sektor Pangan

No	Jenis Sukuk	Nazhir	Program Penunjang Kesehatan	Tahun
1	SWR002	YPIA	Bantuan pembiayaan perternak sapi desa binaan di NTB	2021
2	SWR002	BNB	Pemberdayaan masyarakat melalui pertanian akuaponik, dan perternakan kambing dan puyuh	2021
3	SWR003	Yayasan BSM	Pembibitan ternak domba dan kambing	2022

Peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

No	Jenis Sukuk	Nazhir	Program Penunjang Kesehatan	Tahun
		Umat	daerah purbalingga Jawa Tengah	
4	SWR003	BMM	Pemberian bibit kambing untuk dikembangbiakkan di Kulon Progo Yogyakarta	2022
5	SWR003		Pengembangan usaha ternak Kambing di Kulon Progo Yogyakarta	2022
6	SWR003	YPM Salman ITB	Urban farming berbasis masjid di perkantoran	2022
7	SWR003	BWI	Peningkatan produktivitas peternakan	2022
8	SWR003	Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa	Pemberdayaan masyarakat melalui ternak hewan	2022
9	SWR003	Yayasan Global Wakaf	Wakaf ternak produktif	2022
10	SWR003	YPI Al-Azhar)	Pembiayaan peternak sapi desa binaan	2022
11	SWR004	BSI Maslahat	Pemberdayaan peternakan sapi	2023
12	SWR004	BWI	Pemberdayaan peternak	2023
13	SWR005			2024

Diolah dari Data Laporan Tahunan DJPPR

Pada Tabel 4 program penerimaan imbal hasil SWR pada sektor ketahanan pangan juga berhubungan dengan sektor ekonomi, hal ini sesuai data yang ada bahwa sebagian besar program yang diterbitkan dilakukan dengan skema pemberdayaan. Dengan skema pemberdayaan pada sektor pertanian dan peternakan, dapat mempertahankan sektor pangan secara berkelanjutan. Hal ini juga bertujuan selain untuk menjaga ketahanan pangan nasional program-program di atas juga berorientasi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkat produktivitas masyarakat.

4. Sektor Ekonomi

Tabel 5. Daftar Pembiayaan SBSN Pada Sektor Ekonomi

No	Jenis Sukuk	Nazhir	Program Pada Sektor Ekonomi	Tahun
1	SWR002	LAZIZNU	Bantuan Modal UMKM	2021
2	SWR002	LAZIZMU	Pemberdayaan UMKM	2021
3	SWR002	BMM	Program Sahabat UMKM	2021
4	SWR002	Global Wakaf	Wakaf Ekonomi produktif modal usaha UMKM	2021
5	SWR003	LAZIZMU	Pemberdayaan UMKM	2022
6	SWR003	Yayasan BSM Umat	Program UMKM: Pengembangan Klaster Usaha Berbasis Pesantren	2022

No	Jenis Sukuk	Nazhir	Program Pada Sektor Ekonomi	Tahun
7	SWR003	Yayasan Global Wakaf	Wakaf Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	2022

Diolah dari Data Laporan Tahunan DJPPR

Tabel menunjukkan bahwa sejak diterbitkan Sukuk jenis SWR berperan dalam pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan sukuk bertujuan untuk meningkatkan dan mendorong pertumbuhan usaha di masyarakat. Sehingga masyarakat akan lebih produktif dan akan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pembahasan

Perkembangan SBSN di Indonesia

Sejak diterbitkan perdana pada tahun 2008 perkembangan sukuk hingga saat ini cukup signifikan. Dengan adanya Sukuk Negara dapat memenuhi APBN secara mandiri, sehingga dapat membantu percepat pembangunan. Menurut Suharianto dan Ihwan Hadi Sunarno perkembangan Sukuk Negara dikelompokkan menjadi tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Awal (2008-2012)

a. Penerbitan Sukuk

Keuangan pada tahun 2008 menerbitkan SBSN sebagai upaya memperluas sumber alternatif pembiayaan SBSN. Penerbitan SBSN juga berperan untuk mempercepat perkembangan industri keuangan syariah di pasar domestik maupun di dunia internasional. Penerbitan sukuk didasarkan pada UU Pasal 1 No. 19 Tahun 2008 membahas tentang Surat Berharga Negara (SBN) sebagai surat pengakuan utang negara dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, dan pada pasal 20 menerangkan bahwa Surat Berharga Negara meliputi Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada UU No. 19 Pasal 4 Tahun 2008 tujuan penerbitan SBSN untuk mendukung pembiayaan APBN termasuk pembiayaan proyek. Selain itu pemerintah menerbitkan sukuk untuk diversifikasi instrumen pembiayaan negara dengan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk pertama yang diterbitkan adalah suku jenis IFR (*Islamic Fixed Rate*) dengan seri IFR001 dan IFR002 yang diterbitkan pada 26 Agustus 2008, pada penerbitan pertama terkumpul dana investor sebesar 4,7 Triliun.

b. Diversifikasi Jenis Sukuk

Pada fase awal penerbitan sukuk investor hanya diterbitkan kepada institusi. Untuk memperluas target pasar pada tahap awal pemerintah melakukan beberapa penerbitan sukuk jenis baru, dengan tujuan untuk menarik minat banyak investor. Jenis sukuk yang awalnya diterbitkan untuk institusi ditambah dengan menerbitkan sukuk yang ditujukan pada kepemilikan individu. Sehingga pada awal tahun 2009 pemerintah menerbitkan sukuk dengan jenis Sukuk Ritel (SR). Seri yang diterbitkan pada waktu itu

SR001 dengan masa penawaran 30 Januari sampai 20 Februari 2009. Penerbitan Sukuk Ritel seri pertama sangat diterima oleh masyarakat sehingga mengalami kelebihan pesanan (*oversubscribe*).

Dua bulan sejak Sukuk Ritel (SR) diterbitkan tepatnya pada tanggal 23 April 2009 pemerintah menerbitkan Sukuk Global dengan seri SNI dalam valuta asing sebesar Rp. 650.000.000 US Dollar. Penerbitan ini merupakan penerbitan perdana oleh pemerintah di pasar global. Pada tanggal 7 Mei 2009 pemerintah mengeluarkan sukuk Jenis SDHI (Surat Dana Haji Indonesia) yang merupakan bentuk kerjasama kementerian keuangan dengan kementerian agama untuk meningkatkan pemanfaatan dana haji dan dana abadi umat. Seri pertama yang diterbitkan adalah SDHI 2010. Mekanisme pada SDHI ini dengan cara kementerian agama menempatkan dana haji secara langsung (*private placement*).

Untuk menyalurkan dana pada pembangunan negara dan memberikan manfaat langsung pada masyarakat melalui Sukuk Negara, kementerian keuangan menerbitkan sukuk jenis *Project Based Sukuk* (PBS). Sukuk jenis PBS diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai pembangunan proyek. Penerbitan PBS perdana dengan dua seri yaitu seri PBS-0001 dan PBS-002, yang diterbitkan pada tanggal 11 oktober 2011. Pada tanggal 18 Mei 2012 pemerintah perdana menerbitkan Sukuk Negara tambahan atau *Green Shoe Option* (GSO) dengan se SPN-S 09112012. Penerbitan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan *refinancing* Sukuk Negara jangka pendek yang jatuh tempo sehingga dapat menjaga stabilitas harga.

2. Pengembangan Sukuk (2013-2018)

Tahap kedua dimulai sejak tahun 2013, pada tahap ini Sukuk Negara terus mengalami perkembangan yang baik. Pemerintah semakin menerbitkan banyak jenis Sukuk Negara dengan orientasi yang semakin spesifik. Pada tahun 2013 perdana penerbitan SBSN jenis *Project Financing Sukuk*. Penerbitan *Project Financing Sukuk* disini bertujuan untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur pemerintah, yang dananya dialokasikan pada APBN.

Pada tahun 2016 kementerian keuangan meluncurkan Sukuk Negara dengan jenis Sukuk Tabungan (ST). Sukuk Tabungan (ST) yang diterbitkan pertama kali dengan seri ST-001 yang penawarannya dimulai pada tanggal 22 Agustus sampai 22 September 2016. Dengan investor pada seri ST-001 sebanyak 11.338 investor dan dana yang terkumpul sebesar Rp 2,585 Triliun. Suku Tabungan bisa didapatkan di agen penjual di bank dan agen skuritas. Pada tahun 2018 sukuk tabungan dikembangkan lagi dengan penebitan Sukuk Tabungan (ST) dengan jenis *Green Sukuk*. Penerbitan *Green Sukuk* untuk mewujudkan ekonomi ramah lingkungan. Penerbitan *Green Sukuk* pada seri pertama ini ditawarkan di pasar global.

Perkembangan teknologi yang semakin mempermudah manusia dalam berinteraksi dan bertransaksi dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menarik banyak investor pada Sukuk Negara. Pemerintah pada tahun 2018 mendebatkan penerbitan Sukuk Ritel (SR) secara online. Seri ST002 menjadi sukuk pertama yang ditawarkan

dengan memanfaatkan platform online. Dengan inovasi ini investor dapat membeli dan mengelola dana Sukuk Negara melalui platform digital yang disediakan oleh mitra distribusi. Pengembangan dari platform ke online menarik banyak generasi milenial untuk berinvestasi.

3. Inovasi dan Pertumbuhan Berkelanjutan (2019 - Hingga Sekarang)

Pada tahap ketiga ini menteri keuangan terus berinovasi dalam meluncurkan berbagai jenis sukuk. Pada tanggal 1 november hingga 21 november 2019, kementerian keuangan menerbitkan Sukuk Tabungan (ST) seri ST-006, penerbitan ini berorientasi pada investasi ramah lingkungan, sehingga ST-006 menjadi green sukuk ritel pertama yang diterbitkan dengan menargetkan individu dalam negeri. Di tahap ketiga ini juga diterapkan Sistem Dealer Utama (DU) SBSN setelah 4 tahun penerbitan dealer utama Surat Utang Negara (SUN).

Penerapan sistem Dealer Utama (DU) pertama kali diterapkan pada tahun 2020, bersama dengan *pandemic covid 19*. Dengan adanya Dealer Utama (DU) diharapkan dapat mengurangi resiko pasar (*market risk*) dan *financing risk* bagi pemerintah. Meskipun bersamaan dengan *pandemic covid 19* penerapan sistem Dealer Utama (DU) terbukti mampu mempertahankan permintaan di pasar perdana dan likuiditas di pasar sekunder serta meningkatkan kinerja SBSN dibandingkan sebelum adanya sistem Dealer Utama (DU).

Pada tahun 2020 perdana ditawarkannya sukuk jenis CWLS (*Cash Wakaf Linked Sukuk*) atau sukuk wakaf. Penerbitan Sukuk Negara jenis CLWS ini bertujuan menargetkan investor yang berorientasi pada filantropi dan sosial. Pada debut pertama pemerintah mengeluarkan CLWS dalam dua seri yang ditujukan pada institusi dengan seri SW001 dan untuk investor individu dengan seri SWR001.

Peran SBSN dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu didukung oleh pembangunan partisipatif oleh pemerintah. Salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah adalah penerbitan SBSN atau Sukuk Negara. Sukuk Negara memberikan menjadi peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun Sukuk Negara secara tidak langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara instan, tetapi pemerintah telah mengoptimalkan pengalokasian pembiayaan dari investasi sukuk pada sektor-sektor yang menjadi kebutuhan dasar untuk kesejahteraan masyarakat dan program dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang telah dibiayai. Sehingga orientasi pembiayaan berfokus kepada kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Berikut peran SBSN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa pembangunan SBSN.

1. Memperluas Layanan dan Fasilitas Kesehatan

Kesehatan individu menjadi kebutuhan dasar untuk mencapai kesejahteraan individu. Individu yang sehat akan meningkatkan produktivitas individu. Hal ini menjadi pedoman bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara

pemerintah harus memfokuskan pada kesehatan masyarakatnya. Kesehatan yang terjamin didukung oleh fasilitas kesehatan yang tersedia. Fasilitas kesehatan dapat meliputi rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, klinik dan laboratorium.

Peran fasilitas kesehatan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tiga pendekatan. *Pertama* pendekatan *input*, pendekatan ini berhubungan dengan dukungan pengadaan fasilitas kesehatan, meliputi dukungan pada penambahan jumlah tenaga kesehatan dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan serta peningkatan penyediaan alat medis dan obat-obatan. *Kedua* pendekatan *Output* berhubungan dengan hasil dari pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Pendekatan *output* dapat ditingkatkan dengan melakukan berbagai langkah efektif, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat, memperluas jangkauan program-program kesehatan yang ada, serta meningkatkan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan. *Ketiga* pendekatan *outcome*, pendekatan yang berhubungan dengan dampak yang dihasilkan dari pelayanan kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak pelayanan kesehatan dapat meningkat dengan cara, meningkatkan kesehatan, menurunkan angka kematian dan kesakitan, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program kesehatan yang ada (Tambaip et al., 2023).

Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan input untuk memaksimalkan peran fasilitas kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun alokasi pembiayaan untuk sektor kesehatan masih relatif rendah dibandingkan sektor lain, pembiayaan melalui CLWS (sukuk wakaf) yang berfokus pada investasi sosial mendukung program bantuan kesehatan. Pada tahun 2020, SWR seri 001 mendanai pengembangan aset wakaf berupa renovasi dan pembelian alat kesehatan untuk pembangunan retina center di RS Wakaf Achmad Wardi Serang, Banten, yang menghasilkan program operasi katarak gratis bagi 2.513 pasien dhuafa hingga 2025 serta pengadaan mobil ambulance. Pada tahun 2024, CLWS seri SWR 005 yang diterbitkan oleh Dompot Dhuafa digunakan untuk pengadaan alat kesehatan di RS AKA Sri Bhawono, Lampung Timur.

Dari data yang dipaparkan dapat ditarik kesimpulan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan dan memperluas layanan dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Dengan pembangunan infrastruktur kesehatan, pengadaan alat kesehatan dan program-program pengobatan gratis bagi masyarakat, terutama masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Program-program tersebut tentunya memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, dimana tingkat produktivitas masyarakat bisa terjaga karena layanan dan fasilitas kesehatan terjamin.

2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Fasilitas kesehatan sebagai kebutuhan dasar telah dipenuhi, sehingga langkah selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang menjadi prioritas kedua setelah kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh

karena itu, alokasi dana Sukuk Negara tidak hanya difokuskan pada sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor infrastruktur pendidikan, termasuk beasiswa untuk anak bangsa. Dari 2015 hingga 2024, total dana sebesar Rp. 28,04 triliun dialokasikan untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi Islam. Pengalokasian SBSN yang diperoleh dari penerbitan Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan antara 2016 hingga 2023 berfokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan, termasuk sarana prasarana dan fasilitas gedung di 192 PTKIN, 99 PTN, 915 Madrasah, 6 SMK, 8 Poltek, serta laboratorium dan fasilitas riset dan teknologi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan akses pendidikan di Indonesia.

Infrastruktur dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dipisahkan. Keduanya saling menopang satu sama lain. Jika pendidikan tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai, maka proses pendidikan pun akan terhambat. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan di sektor pendidikan mendapatkan penyaluran dana sukuk yang cukup besar, dengan kontribusi terbesar disalurkan kepada pendidikan di bawah naungan kementerian agama. Walaupun demikian masih banyak rintangan besar dalam merenovasi sarana dan prasana pendidikan, terutama di daerah yang jauh dari jangkauan yang fasilitas pendidikannya masih jauh dari standar Pendidikan (Alfariz et al., 2025).

Dampak dari pembangunan infrastruktur di sektor pendidikan dapat memperluas jangkauan pendidikan bagi masyarakat, meningkatkan kualitas riset dan pembelajaran, kualitas tenaga pendidikan akan semakin meningkat dan lulusan yang berpendidikan akan memiliki mutu dan kualitas yang semakin mumpuni mengikuti perkembangan zaman. Hal-hal tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan daya saing sumber manusia di Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga hal ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerataan pendidikan di daerah terpencil, akan menjadi salah satu upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan merupakan investasi awal untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan memperkuat sistem pendidikan, meningkatkan ketersediaan akses dan memperbaiki kualitas pendidikan akan membawa masyarakat pada kualitas pendidikan yang baik, sehingga akan meningkatkan produktivitas masyarakat secara keseluruhan, yang pada akhirnya membawa kepada kesejahteraan ekonomi Masyarakat (Latansa & Sassi, 2025; Widiawati et al., 2024). Hasil Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Rachmad et al., (2023) menyatakan pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur, pendidikan dan sektor lainnya memberikan dampak secara langsung bagi kesejahteraan Masyarakat (Mahanani, 2019; Rachmad et al., 2023).

Adanya kontribusi sukuk pada sektor pendidikan melalui pembangunan infrastruktur pendukung pendidikan dan beasiswa bagi anak bangsa menjadi salah satu investasi jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan dikatakan sebagai investasi jangka panjang karena pendidikan

mencerminakan *multiflayer effect* dalam lintas generasi. Maka dari itu pembiayaan sukuk memiliki peran penting untuk percepatan pembangunan di sektor Pendidikan (Arifin, 2023).

Pembiayaan dari Sukuk Ritel (SR) dan Sukuk Tabungan (ST) fokus pada pembangunan infrastruktur, sementara Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) mendukung program-program pendidikan, seperti penerimaan imbalan SWR004 yang disalurkan oleh Dompot Dhuafa kepada 1 juta sekolah di Indonesia untuk program digitalisasi. Selain itu, beasiswa dari sukuk wakaf ritel dapat meningkatkan minat anak bangsa untuk melanjutkan pendidikan tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing individu di dunia kerja dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi serta kesejahteraan. Pembiayaan infrastruktur pendidikan melalui SR dan ST juga memperluas akses pendidikan dan berperan dalam meningkatkan kualitas riset, pembelajaran, dan pengajaran.

3. Memperkuat Ketahanan Pangan

Pangan adalah kebutuhan konsumsi manusia yang harus terpenuhi secara berkelanjutan, sehingga bisa hidup sehat dan produktif, maka dari itu ketahanan pangan sangat diperlukan dan menjadi prioritas dalam suatu negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Secara terperinci pangan merupakan segala sesuatu yang diperoleh dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, baik yang sudah diolah maupun tidak diolah yang ditujukan sebagai konsumsi bagi manusia (Rumawas et al., 2021). Dalam UU No. 18 tahun 2012 dijelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan keadaan tercukupinya pangan bagi negara dan individu, hal ini tergambarkan dengan tersedianya pangan yang cukup, baik kuantitas maupun kaulitasnya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan budaya, keyakinan dan agama. Indonesia sebagai negara agraris menjadikan sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan utama bagi Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang salah satu penyumbang terbesar perekonomian berasal dari sektor pertanian. Hal tersebut disebabkan sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian, akan tetapi Indonesia masih mempunyai masalah berhubungan dengan pangan. Sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadap sektor lainnya seperti industri dan jasa. Sektor pertanian berperan dalam menyediakan pangan serta bahan baku, sehingga berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan *Produk Domestic Regional Bruto* (Kristriantono & Yuliawati, 2022; Oktavia et al., 2015). Hal tersebut pada akhirnya perkembangan sektor pertanian akan memberikan dorongan terhadap pertumbuhan di sektor jasa dan industri. Dimana di negara maju sektor pertanian menjadi awal pertumbuhan ekonomi yang kemudian diiringi dengan kegiatan Industr (Liana et al., 2024). Peran sektor pangan yang sangat signifikan pada ketahanan pangan dan pertumbuhan perekonomian di suatu negara tentunya harus didukung aktif oleh partisipasi pemerintah.

Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan pertanian (bantuan benih padi jagung) (Fausi et

al., 2024). Pelaksanaan program wajib ketahanan pangan oleh pemerintah melalui bantuan bibit tanaman dalam pertanian, perternakan dan bantuan modal dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat (Al Azis, 2022). Untuk meningkatkan ketahanan pangan, pemerintah Indonesia telah berperan aktif dengan mengeluarkan program yang berkaitan pada sektor ketahanan pangan. Program-program tersebut didukung oleh APBN dan salah satu sumber pembiayaan APBN berasal dari Sukuk Negara.

Sukuk Negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN memegang peran dalam menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sesuai dengan data yang ada sukuk jenis SWR sudah banyak membiayai program-program sosial di sektor pangan. Pembiayaan dari hasil sukuk wakaf disalurkan kepada sektor pangan dengan skema pemberdayaan dan peningkatan produktivitas perternakan maupun pertanian. Skema seperti ini digunakan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan.

4. Mendorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Peningkatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu kunci dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan peningkatan ekonomi yang merata dan inklusif dapat mengurangi angka kemiskinan, dimana kemiskinan menjadi halangan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui instrumen pembiayaan dari SBSN yaitu, pembangunan infrastruktur jalan, pembiayaan pemberdayaan UMKM, pemberdayaan masyarakat, dan pembiayaan di sektor pertanian dan perternakan.

Infrastruktur jalan menjadi instrumen penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sehingga membantu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur umum mencakup pembangunan jalan, jembatan pelabuhan, bandara dan fasilitas umum lainnya. Sehingga infrastruktur selain menjadi arus mobilitas sosial juga menjadi penunjang dalam berbagai aspek (Ompusunggu, 2019). Infrastruktur jalan memiliki tiga fungsi yaitu, pertama sebagai *land acces* membuka akses antar daerah, sehingga meningkatkan PDRB serta mengurangi jumlah daerah tertinggal. Kedua berfungsi sebagai *community servicefunction*, pada fungsi ini infrastruktur jalan memberikan jasa pada pendistribusian produk, pemasaran, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Ketiga, sebagai *interchange community*, fungsi ini memiliki peran penting sebagai pelayanan bagi masyarakat jarak jauh (Hutauruk, 2021).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang baik dan memadai maka mobilitas kegiatan ekonomi antar daerah akan lebih cepat, sehingga perputaran ekonomi akan lebih efektif dan merata ke setiap daerah. Perputaran ekonomi yang efektif akan meningkatkan ekonomi masyarakat dan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sejak tahun 2013 menteri keuangan telah menerbitkan *Project Financing Sukuk* dimana target utamanya adalah membiayai proyek infrastruktur pemerintah terutama pada jalan, jembatan dan transportasi yang dialokasikan ke APBN. Hal ini sesuai dari data statistik yang ada bahwa sebagian besar

penghimpunan dana SBSN dialokasikan pada sektor infrastruktur jalan, jembatan dan transportasi.

Kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat juga ditingkatkan melalui program-program pemberdayaan UMKM. Cara UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menciptakan lapangan kerja. Sehingga UMKM menjadi pencipta lapangan terbesar di banyak negara, terutama di sektor informal. Dengan merekrut penduduk lokal UMKM mampu menurunkan tingkat pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan memberikan jalan kepada individu yang kurang beruntung. Menurut satriaji UMKM memiliki empat peran dalam hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat yaitu, 1) Mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial, 2) UMKM mampu menjadi kesempatan bagi individu untuk membuka usaha sendiri, 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, 4) Meningkatkan pendapatan dan daya beli Masyarakat (Utari & Fitrawaty, 2025; Vinatra, 2023; Yolanda, 2024).

Dalam rekam jejaknya SBSN melalui sukuk wakaf membiayai program pemberdayaan pada UMKM, pertanian dan perternakan. UMKM mampu menyerap banyak pekerja sehingga akan meberikan dampak pada kesejateraan dan pemerataan pendapatan hal ini akan memberikan kesempatan bagi individu yang memiliki kreativitas untuk berkarya sehingga membuka lapangan pekerjaan sebagai wirausaha, dari hal tersebut akan memperluas jumlah prospek kerja dan akan terciptaya bayak sektor usaha (Qadisyah et al., 2023). Maka dari itu pemerintah melalui pembiayaan sukuk wakaf ritel (SWR) membiyai pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarat. Pembiayaan pemberdayaan UMKM dari sukuk wakaf dengan memberikan program bantuan modal dan alat usaha, menjadi langkah awal pemerintah dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, sehingga produktivitas masyarakat semakin meningkat dan akan meningkatkan ekonomi masyarakat karena lapangan pekerjaan semakin banyak, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dampak dari diterbitkannya Sukuk Negara tidak hanya pada pembiayaan proyek pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Dampak penerbitan sukuk bisa langsung dirasakan masyarakat pada sektor ekonomi. Karena sukuk merupakan bagian dari instrumen investasi, maka sukuk menjadi salah satu instrumen bagi setiap individu untuk meningkat nilai asset yang dimiliki. Penerbitan SBSN memberikan kesempatan bagi individu masyarakat yang mengalami surplus dana untuk berinvestasi dalam pembangunan Indonesia. Selain itu Sukuk Negara menjadi salah satu instrumen investasi yang bebas risiko karena dijamin oleh negara, serta imbal hasil yang didapatkan lebih menguntungkan daripada investasi yang sejenis seperti deposito (Latifah, 2020). Berdasarkan prespektif ekonomi Islam investasi berbasis syariah dapat menciptakan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan kesejahteraan umum (Dinata & Setyanto, 2025).

Dari pembahasan di atas dapat dipahamai, peran sukuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor ekonomi yaitu, sukuk berperan dalam membangun infrastruktur, dari pembangunan infrastruktur akan memutar roda

perekonomian secara efektif dan merata, sukuk berperan dalam pemberdayaa UMKM sehingga berdampak pada perluasan lapangan tenaga kerja dan sukuk berperan dalam instrumen investasi bagi setiap individu, sehingga dana yang dimiliki akan menjadi produktif. Tiga hal tersebut merupakan upaya sukuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

5. Mendukung Keberlangsungan Lingkungan

Krisis lingkungan kini menjadi isu global yang mendapat perhatian serius di seluruh dunia, disebabkan oleh pembangunan industri yang pesat dan berkurangnya kawasan hijau, yang mengakibatkan pemanasan global. Pemanasan global ini disebabkan oleh emisi gas rumah kaca, terutama karbon monoksida yang dihasilkan industri, yang terus meningkat dan mengganggu keseimbangan bumi, menimbulkan bencana ekologi dan ekonomi, serta mengancam kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, solusi dan strategi berkelanjutan, seperti ekonomi hijau, sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Beberapa negara, termasuk Indonesia, telah mengadopsi ekonomi hijau, meskipun pendanaan untuk proyek energi terbarukan sering menjadi kendala. Indonesia telah menerbitkan instrumen investasi seperti *Green Bond* dan *Green Sukuk* sebagai upaya mendukung pembangunan berkelanjutan dan partisipasinya dalam penyelamatan bumi. *Green Sukuk*, yang mirip dengan obligasi, mengikuti standar *Green Bond Principles* (GBP) untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Pemerintah Indonesia pada tahun 2017 berinisiatif menerbitkan kerangka kerja *green sukuk* (*Green Sukuk Framework*). Kerangka kerja ini berorientasi pada pembiayaan proyek yang mendukung peralihan menuju pembangunan ekonomi rendah emisi dan ramah lingkungan. Kerangka kerja *green sukuk* telah mendapatkan *Second Opinion* dari *Centre for International Climate Research* (CICERO) dan memperoleh hasil “*Medium Green*” dari keseluruhan kerangka *green bond* (sukuk). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pembiayaan yang dituju telah sesuai dengan upaya menuju visi nasional dalam pengurangan emisi karbon. Pada tahun 2018 pertama kali *green sukuk* resmi diterbitkan sebesar USD 1,25 Miliar (Syari, 2020).

Berdasarkan kajian dari UNDP di tahun 2020, penerbitan *green sukuk* ritel berdampak pada perekonomian antara lain yaitu, memberikan dampak pengurangan emisi rumah kaca dan pelestarian lingkungan. Berpartisipiasi dalam menambah pendapatan fiskal negara serta mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Menjadi pelopor penerbitan *green sukuk* sehingga menjadi contoh bagi korporasi mau daerah. Memperluas pasar dengan menarik banyak investor baru yaitu *green investor*. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan (Rifantini, 2024; Suherman et al., 2024).

Kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat didukung dengan lingkungan, pentingnya menjaga lingkungan untuk keberlanjutan populasi, keamanan lingkungan dan lingkungan yang sehat akan mendukung produktivitas manusia dalam mencapai kebutuhan. *Green sukuk* berperan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat

di Indonesia melalui pembiayaan proyek-proyek yang berfokus pada lingkungan yang berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pembangkit listrik bersih, ketahanan terhadap perubahan iklim, transportasi berkelanjutan, wisata dan bangunan hijau, serta pengelolaan energi, limbah, dan sumber daya alam. Dengan mendukung lingkungan yang sehat dan aman, *green* sukuk membantu mencapai produktivitas manusia dan keberlanjutan populasi, serta memperkuat pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Sukuk Negara (SBSN) telah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan di sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, transportasi, dan ekonomi hijau. Selain itu, sukuk juga memberikan kontribusi pada kehidupan sosial dan ekonomi, seperti bantuan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan beasiswa pendidikan. Dengan inovasi yang terus berkembang, sukuk menjadi instrumen yang strategis dalam mendukung pembangunan social - ekonomi di Indonesia serta mempromosikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemangku kebijakan untuk menjadikan sukuk sebagai alternatif pembiayaan mandiri dalam pembangunan negara dan daerah, serta untuk menarik minat masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan melalui investasi yang sesuai dengan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Azis, M. V. N. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 23–31.
- Alfariz, A. T., Perkasa, D. D., & Hasibuan, I. A. (2025). Peran Sukuk Negara di Dalam Bidang Pendidikan. *Journal of Comprehensive Science (Jcs)*, 4(2). 10.59188/jcs.v4i2.3040
- Amaliyah, H., Prayogie, F. A., Islamiyah, K., & Sujianto, A. E. (2023). Perkembangan Instrumen Sukuk Negara dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(2), 131–144. <https://doi.org/10.30640/digital.v2i2.1062>
- Anggoro, A., Rohmah, I. Y. A., Irawan, N. C., Utomo, P., Putra, R. B., Tubarad, Y. P., Zulianto, M., Susanto, D., Metris, D., & Musthopa, A. (2023). *Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi: Peluang dan Tantangan*. Pustaka Peradaban.
- Arifin, S. (2023). SBSN dan Investasi Aset Internal. *Buletin Sahabat Sukuk Negara*, 7, 123–129.
- Dinata, A. S., & Setyanto, A. R. (2025). Pengaruh Tingkat Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 215–221. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i1.591>
- Fahlevi, M. F. (2024). Analisis Tantangan dan Peluang Perkembangan Green Sukuk di Indonesia. *Journal of Syntax Literate*, 9(10).

- Fausi, A. F., Sholichah, N., & Kamariyah, S. (2024). Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Program Bantuan Peningkatan Produksi dan Produktivitas di Kabupaten Sampang. *Soetomo Administrasi Publik*, 2(1), 261–270.
- Herianti, H., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). Industri Halal dari Perspektif Potensi dan Perkembangannya di Indonesia. *Indonesia Journal of Halal*, 6(2), 56–64. <https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19249>
- Hutauruk, R. P. S. (2021). Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(1), 24–37.
- Jefri, A. R. I. S. (2022). *Analisis Pengaruh Surat Berharga Syariah Negara terhadap Sektor Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia Tahun 2015-2018 dalam Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Raden Intan Lampung.
- Khatimah, H. (2023). *Analisis Kesejahteraan Mustahik Sebelum dan Setelah Menerima Zakat Produktif pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan Sul-Sel*. Universitas Hasanuddin.
- Kristriantono, P., & Yulawati, Y. (2022). Dampak Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 18(2), 141–158.
- Latansa, M. I., & Sassi, K. (2025). Upaya Sistem Pendidikan Di China Dalam Meningkatkan Human Development Index. *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 1828–1850. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.7285>
- Latifah, Si. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 421–427. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369>
- Liana, W., Kusumastuti, S. Y., Damanik, D., Hulu, D., Apriyanto, A., Judijanto, L., Wartono, T., Suharto, S., Fitriyana, F., & Hariyono, H. (2024). *Teori Pertumbuhan Ekonomi: Teori Komprehensif dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mahanani, A. E. E. (2019). Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 1(2), 17–35.
- Nasution, F. A., & Budiman, A. (2024). Implementasi Bantuan Program Peningkatan Kebiasaan Menuju Masyarakat Sejahtera di Kelambir Lima. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (Juribmas)*, 3(1), 315–323.
- Oktavia, Z., Darwanto, D. H., & Hartono, S. (2015). Sektor Pertanian Unggulan di Sumatera Selatan. *Agraris: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 1(2), 61–69.
- Ompusunggu, V. M. (2019). Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo. *Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 3(2).
- Qadisyah, M., Hasanah, A., Hanum, H., & Harahap, N. (2023). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

- Manivest: Jurnal Manajemen, Ekonomi, Kewirausahaan, dan Investasi*, 1(2), 159–168.
- Rachmad, A. F., Azaria, E., Xusan, Q. N., & Azzahra, N. (2023). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 75–88. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.773>
- Rambe, I. (2023). *Pengaruh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia*. Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Rifantini, A. (2024). The Role of Government Policy in The Development of Green Sukuk in Indonesia: Peran Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Green Sukuk di Indonesia. *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan*, 1(3).
- Romadhoni, D. D., Ramidah, N., & Damayanti, R. K. (2023). Optimalisasi Peran Sukuk sebagai Instrumen Investasi Syariah dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 85–98. <https://doi.org/10.14710/djieb.20236>
- Rumawas, V. V., Nayoan, H., & Kumayas, N. (2021). Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Governance*, 1(1).
- Sabilah, H. (2024). *Pengaruh Investment Opportunity Set dan Cash Conversion Cycle Terhadap Cash Holding pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang Tercatat di Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Periode 2013-2023*. Uin Sunan Gunung Djati Bandung.
- Saestu, I. (2023). Perkembangan Industri Halal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Proceedings and Annual Conference Of Islamic Law and Sharia Economic (Ipacilse)*, 1(1), 87–92.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suherman, S., Kristina, P., & Natalia, D. (2024). Potensi Penerbitan Green Sukuk Daerah dalam Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan di Kalimantan Tengah. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics And Business*, 4(6), 3119–3131.
- Sundari, A., & Ridwan, A. H. (2022). Tafsir dan Hadist Sukuk Obligasi Syariah (Mengungkap Konsep Transaksi Kebatilan dalam Qs. An-Nisa: 29). *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(6), 2464–2472.
- Syari, A. H. (2020). *Konstruksi Green Sukuk dalam Ekonomi Berkelanjutan Perspektif Maqāsid Al*.
- Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023). Peran Fasilitas Kesehatan untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 189–196. <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8245>
- Trimulato, T. (N.D.). Pengembangan Produk Sukuk Negara Khusus Pemulihan Sektor UMKM di Tengah Wabah Covid-19. *Jurnal Pusat Akses Kajian Akuntansi, Manajemen, Investasi, Dan Valuta*, 1(1), 10–21.

- Utari, W., & Fitrawaty, F. (2025). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(2), 529–537.
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–8.
- Widiawati, R., Nabilah, F., Qudsi, I., Mardikaningsih, R., Hariani, M., Vitrianingsih, Y., Retnowati, E., Masnawati, E., & Lestarie, U. P. (2024). Sosialisasi Beasiswa Kampus: Upaya Memperluas Akses dan Kesempatan Bagi Mahasiswa Berprestasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana*, 2(4), 56–68.
<https://doi.org/10.59603/jpmnt.v2i4.551>
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186.